

DEFICIENCIES IN THE USE OF SOCIAL FOOD ASSISTANCE FUNDS (SEBAKO PROGRAM) WITH A PACKAGE SYSTEM FOR POOR FAMILIES

Dedik Harianto

Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia
Email: dedikharianto_@outlook.com

Abstract

National development is intended to achieve dynamic social change in the form of meeting the basic needs of society. The process of social change that increases the standard of living of the poor as a whole, where development is carried out to complement each other through the process of economic development. However, if this change process does not go according to plan, it shows an indication of a deficiency in the program. Government assistance such as the Food Social Assistance (Sembako Program) is one form of social protection efforts to reduce the expenditure burden of poor and vulnerable families in meeting their food needs. The efficient use of grants is also the key to the success of the development process itself. Herein lies the important role of the structural functions of each agent such as the Social Service as a local policy maker, the State Bank Association (Himbara) as a distributor of funds, a Supplier as a supplier of foodstuffs, an Agent / E-Warong as a food seller and a Beneficiary Family (KPM) as a fund manager. If their respective roles are not in accordance with the main policies of the program makers, this shows that there is a deficiency in the use of grants that are not in accordance with general guidelines.

Keywords: *Poverty, Food Social Assistance, Structural Functionalism*

Abstrak

Pembangunan nasional dimaksudkan untuk mencapai perubahan sosial yang dinamis dengan wujud terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Proses perubahan sosial yang meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin sebagai suatu keutuhan, dimana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi melalui proses pembangunan ekonomi. Akan tetapi, jika proses perubahan ini tidak berjalan sesuai dengan rencana, itu menunjukkan indikasi terjadinya defisiensi pada program tersebut. Bantuan pemerintah seperti Bantuan Sosial Pangan (Program Sembako) salah satu bentuk upaya perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Pemanfaatan dana bantuan secara efisien juga menjadi kunci berhasilnya proses pembangunan itu sendiri. Disinilah letak peran penting fungsi struktur masing-masing agen seperti Dinas Sosial sebagai penentu kebijakan lokal, Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai penyalur dana, Suplier sebagai pemasok bahan pangan, Agen/E-Warong sebagai penjual bahan pangan dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai pengelola dana. Apabila peran masing-masing sudah tidak sesuai dengan kebijakan utama dari pembuat program maka hal tersebut menunjukkan terjadinya defisiensi penggunaan dana bantuan yang tidak sesuai dengan pedoman umum.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Bantuan Sosial Pangan, Fungsionalisme Struktural*

Pendahuluan

Persoalan kemiskinan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan bermasyarakat. Kemiskinan sebagai masalah sosial yang serius dihadapi banyak keluarga di Indonesia. Dinamika dalam keluarga miskin mengenai pola asuh anak dalam masa perkembangannya yang bisa dikatakan jauh dari porsi ideal. Jika keluarga merupakan komunitas pendidikan dasar bagi individu, maka keluarga yang disfungsional secara khusus merupakan ancaman bagi perkembangan diri anggotanya di dalam dan bagi pembangunan Indonesia pada umumnya. Upaya pembangunan nasional mewujudkan keluarga yang ideal tidak hanya menjadi kewajiban bagi keluarga tersebut saja, akan tetapi turut sertanya pemerintah untuk merealisasikan hal tersebut. Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruhnya masyarakat Indonesia (UU No.52 Tahun 2009). Mencakup aspek dan ruang kehidupan termasuk perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Tujuan utama dari adanya program PKH adalah melaksanakan pembangunan, dalam hal ini pembangunan material dan immaterial. Pencapaian Sumber Daya Manusia yang berpendidikan dan berkualitas adalah salah satu tujuan pembangunan ini, serta pembangunan untuk mewujudkan keluarga sejahtera.

Keluarga sejahtera memiliki makna bahwa keluarga yang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya atau mampu hidup mandiri dalam pemenuhan kebutuhan primer dalam keluarga. Sasaran program Bantuan Sosial Pangan (Program Sembako) adalah keluarga miskin.

Efisiensi dari pemanfaatan program tersebut akan menunjukkan keberhasilan dari upaya pembangunan masyarakat miskin dan disabilitas yang tidak berdaya. Untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan memberikan perlindungan pangan, salah satu upaya pemerintah menempuh untuk melalui program bantuan pada masyarakat miskin yakni dengan Bantuan Sosial Pangan (Program Sembako). Pemanfaatan program ini diharapkan tepat sasaran atau dikatakan fungsional menurut Merton yakni apabila kebutuhan rakyat miskin terpenuhi (Kebutuhan primer), tercapainya pendidikan wajib belajar dua belas tahun dan bagi peyangang disabilitas, mampu untuk mandiri.

Fungsi yang efisien suatu program sangat diharapkan sebagai ukuran keberhasilan dan efisiensi pemanfaatannya, sebaliknya dikatakan defisiensi apabila masih ditemukan perilaku penyimpangan atau kejahatan yang mengarah pada ketidaksesuaian anjuran

petunjuk atau pedoman umum yang telah ditentukan. Oleh karena itu goal setting dalam pencapaian penelitian ini diharapkan bisa menentukan faktor defisiensi dari pemanfaatan bantuan sosial pangan, sasaran tepat penerima bantuan, ketepatan penyalur bantuan, dan penentuan monitoring bantuan sosial serta adanya evaluasi semua itu diharapkan supaya terjadinya efisiensi bantuan sosial pangan yang tepat guna dan tepat sasaran.

Kemiskinan

Kemiskinan dalam arti yang paling umum adalah kurangnya kebutuhan meliputi kurangnya makanan pokok, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan (Bradshaw, 2005). Kemiskinan dikenali dengan ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan primer atau pokok dalam keluarga. Ketidak berdayaan untuk mengekspresikan, mengeksplor kemampuan individu karena keterbatasan, keterbatasan dalam hal ini bisa berwujud keterbatasan financial atau keterbatasan fisik untuk bertindak seperti orang penyandang disabilitas. Dengan mengalami kemiskinan, maka kesempatan mereka untuk mengakses pendidikan yang baik dan bermutu akan semakin kecil disebabkan ketidakmampuan dalam membiayai sekolah. Pendidikan merupakan salah satu alat atau modal manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan hidupnya. Dengan kemampuan pendidikan yang mumpuni bisa menandakan derajat intelektualitas kecakapan dalam menganalisis peluang pekerjaan. Sebaliknya, individu yang berpendidikan kecil kemungkinan untuk mendapatkan peluang pekerjaan bergengsi kecil tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan juga sehingga antara orang yang berpendidikan dan tidak memiliki tingkat kecemasan lebih tinggi (Cutler & Lleras-Muney, 2006).

Oleh karena itu membangun sumber daya manusia adalah utama, ketidak mampuan untuk mendapatkan pendidikan akibat kemiskinan yang harus mendapatkan bantuan. Kemiskinan juga mempersulit akses kesehatan, karena ketidak mampuan untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan, keadaan yang mempersulit akan menyebabkan kecemasan atau terganggunya psikologis (Taylor & Stanton, 2007). Kemiskinan dikategorikan disini sebagai orang atau masyarakat penerima bantuan yakni orang dengan ketidak berdayaan dalam hal finansial, anak pelajar dari keluarga pra sejahtera, ibu hamil yang tidak tercukupi gizi, Para lansia yang sudah tidak mendapatkan subsidi dari keluarga serta penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan dari pemerintah. Penerima manfaat dikategorikan masyarakat miskin atau masyarakat yang

tidak berdaya Pemenuhan kebutuhan masyarakat dan tingkat keefektifan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin berbeda tergantung kebutuhan, jadi tingkat kemiskinan masyarakat bisa terukur dari seberapa kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya seperti, sandang, pangan, papan dan kebutuhan sekolah. Dewasa ini kebutuhan masyarakat organik dengan masyarakat mekanik berbeda.

Tingkat kebutuhan, gengsi dan culture bisa mengindikasikan kemiskinan di masyarakat perkotaan karena kebutuhan tidak tertutupi karena gengsi, adanya tuntutan yang tidak bisa dicukupi oleh masyarakat organik seperti biaya hidup, makan, sekolah, tempat tinggal lebih mahal dari pada biaya hidup dipedesaan. Kemiskinan di Indonesia dan penanggulangnya telah menjadi prioritas pembangunan dan menjadi agenda pokok yang mengerahkan berbagai sumber daya pembangunan. Selama itu pula, dinamika kemiskinan dan penanggulangnya di Indonesia juga turut berkembang (Bappenas, 2012). Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi: (a) Modal produktif atau aset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan); (b) Sumber keuangan (pekerjaan, kredit); (c) Organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial); (d) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang dan jasa; (e) pengetahuan dan keterampilan dan (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup (Friedman, dalam Suharto, dkk., 2004).

Efektivitas

Efektivitas dalam penyaluran bantuan sosial sangat perlu di rencanakan keberhasilannya karena dengan berhasilnya mencapai efektif maka kemiskinan dapat di kurangi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyaluran dana sosial, Dicson dan Wetherbe (1987) dalam Hasibuan (2003:54), menyatakan bahwa aparatur yang bekerja mempunyai peranan penting untuk tersampainya bantuan sosial, meliputi: kualitas aparatur, kompetensi administrator, disiplin, sarana dan prasarana, pengawasan.

Kemampuan aparatur atau petugas penyalur bantuan sangat dibutuhkan karena mengenai skill, kecakapan dan kelilmuan sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengembalian tugas sebagai penyalur bantuan, Manullang (2001:53), kualifikasi SDM yang tepat juga menentukan, meliputi: keahlian, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik, tampang, bakat, tempramen dan karakter.

Kompetensi administrator, disini yang dimaksud adalah memiliki kecakapan dengan apa yang ditanggung jawabkan. Sarana dan prasarana atau peralatan kerja mempunyai andil untuk mempermudah dalam proses keberhasilan suatu program. Sejalan dengan Kaho (2002:184) bahwa faktor sarana dan prasarana yang dimaksud adalah peralatan yang mana penting dalam penyelenggaraan aktifitas pemerintah .

Pengawasan mempunyai andil besar dalam keberhasilan program pemerintah ini yakni sebagai pengontrol dan pengendali terhadap aktivitasnya. Manullang (2001:173) berpendapat menilai pengawasan adalah proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksinya dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan maksud rencana semula. Yang terakhir kosep penyaluran bantuan sosial, disini harus benar-benar matang karena kepada siapa, berupa apa dan bentuk apa bantuan tersebut akan dibagikan, serta siapa yang berhak atau diutamakan dalam penerimaan bantuan tersebut. Penerima bantuan sosial pangan mempunyai hak dalam pendistribusian bahan pangan yang dibeli atau bantuannya sesuai yang dikehendaki.

Metode Penelitian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Terdapat empat komponen analisis data yang dilakukan, yaitu: Pengumpulan Data (Data Collection), Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), dan Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (Conclusion Drawing/Verifying. Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsir data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Instrument utamanya adalah peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Memilih seorang informan harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya (Moleong 2006:132).

Hasil dan Pembahasan

Defisiensi Penggunaan Dana Bantuan Sosial

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, bahwa banyak ketidaktepatan pada proses penyaluran penggunaan dana bantuan sosial pangan yang dilakukan oleh agen struktur bisnis proses didalamnya. Dikarenakan munculnya kepentingan-kepentingan baru dalam proses penyaluran itu. Ada kepentingan ekonomi, kepentingan kekuasaan serta lemahnya fungsi pengawasan penggunaan dana bantuan sosial pangan yang diberikan kepada keluarga miskin. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyaluran dana sosial, Dicson dan Wetherbe (1987) dalam Hasibuan (2003:54), menyatakan bahwa aparatur yang bekerja mempunyai peranan penting untuk tersampainya bantuan sosial, meliputi: kualitas aparatur, kompetensi administrator, disiplin, sarana dan prasarana, pengawasan.

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) sebagai pendamping program bantuan pangan cenderung menunjukkan ketidaksesuaian dalam mengambil kebijakan menentukan sistem penyaluran dana bantuan sosial pangan yang diberikan.

Dalam hal ini agen-agen dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan (Program Sembako) memiliki peran penting masing-masing dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Pendamping Sosial pangan (TKSK) memerankan fungsi pengambilan kebijakan yang efisien dan kontrol yang harus bijak dan turut memahami fungsi dan ketentuan yang dianjurkan oleh pemilik program (Kementerian Sosial)

Jadi dari pengamatan data dilapangan, dapat kita simpulkan bahwa, banyaknya praktik defisiensi penggunaan dana bantuan sosial diluar kegunaan yang seharusnya. Terutama pada penerima bantuan sosial pangan yang tidak melibatkan Keluarga Penerima Manfaat dalam menentukan bahan pangan yang disalurkan. Dengan adanya sistem paket sembako maka KPM merasa dirugikan karena bahan pangan yang mereka terima tidak sesuai seutuhnya dengan yang mereka kehendaki.

Penutup

Program Bantuan Sosial Pangan (Program Sembako) disarankan untuk mengikuri anjuran pemerintah pusat (Kementerian Sosial) dalam melaksanakan penyaluran Bantuan. Agen melakukan proses jual beli yang terbuka, memberikan kebebasan Keluarga

Penerima Manfaat menentukan bahan pangan yang dikehendaki sesuai petunjuk pedoman program.

Agar kedepan program ini berjalan sesuai rencana dan terwujudnya keluarga sejahtera dan suksesnya pembangunan nasional secara merata. Jika dalam penggunaan dana bantuan sosial pangan dapat diterima dan dipilih secara efisien maka perlindungan sosial akan dirasakan manfaat seutuhnya bagi keluarga miskin di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Benton, S. A. (1997). *Dysfunctional Families: Recognizing and Overcoming Their Effects*. Kansas State University Counseling Service. Diakses dari: https://www.kstate.edu/counseling/top_ics/relationships/dysfunc.html
- Bappenas. (2012). *Kemiskinan di Indonesia dan penanggulangannya*. Diakses dari: <http://www.bappenas.go.id/berita-dansiaran-pers/kegiatanutama/kemiskinandidi-indonesia-dan-penanggulangannya/>
- Samsudin., dkk.(2014) Jurnal Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyalur Bantuan Sosial Dibagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,Vol 2 .No1
- Hasibuan,Melayu S.P.,2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dasar dan Kunci Keberhasilan* , Cetakan Keenam,edisi revisi ,Haji Masagung Jakarta
- Kaho,Josef Rihu,2002, *Prospek Otonomi di Negara Republik Indonesia*, Edisi I,Raja Grafindo Persada Jakarta
- Manullang,M.2001, *Dasar-dasar Manajemen* ,Sinar Harapan Medan
- Cutler, D. M. & Lleras-Muney, A. (2006): *Education and Health: Evaluating Theories and Evidence*. Working Paper Series: National Bureau of Economic Research (NBER).
- Taylor, S. E. & Stanton, A. L. (2007): *Coping Resources, Coping Processes, and Mental Health*. Annu. Rev. Clin. Psychol., 3: 377–40